

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT SETEMPAT

Andi Asnudin \*

### Abstract

*This research was conducted to give overview of community involvement in the Rural Infrastructure Development Program (PIIP) in 2009 and its impact, as well as data and information obtained can be used for learning in similar activities in the future.*

*Descriptive analysis methods used in these studies using the full population, namely: the number of PIIP targets 25 villages in Central Sulawesi Province.*

*The result of this research showed that rural infrastructure development project even if quite functional and the public satisfied with the technical performance, but still low level of sustainability. Therefore, the project focus is needed on the future, such as (1) improving aspects of community organizing, (2) transparency, and (3) accountable, and (4) sustainable.*

**Key words :** *Infrastructure, rural, community*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PIIP Propinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, dan (3) akuntabel, serta (4) berkelanjutan

**Kata Kunci :** Infrastruktur, perdesaan, Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan, yaitu mencapai 125 juta jiwa atau 60,2% dari seluruh penduduk Indonesia (Data Sensus Penduduk tahun 2000). Sementara itu tingkat kemiskinan di perdesaan (ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan) memiliki persentase yang cukup tinggi. Jumlah

penduduk miskin total adalah sekitar 37,4 juta jiwa (BPS 2005) atau 17,2 persen (Susenas 2003), dengan persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 20,2 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 13,6 persen.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih

---

\* Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (Pedoman PPIP, 2008)

Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan s/d tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Dengan demikian, dibutuhkan suatu kajian tentang pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan terkait dengan dampak pelibatan masyarakat setempat pada proses pembangunan infrastruktur perdesaan.

Keterbatasan informasi dan data-data tentang dampak pelibatan masyarakat setempat dan tingkat kemampuan masyarakat setempat

dalam penyelenggaraan terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Defenisi dasar**

Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Balai Pustaka, 2003).

Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

### **2.2 Jenis infrastruktur pedesaan**

Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa (1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan, (2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan, dan (3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (Pedoman PPIP, 2006).

### **2.3 Kriteria infrastruktur**

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: (1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak

bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, (2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin, (3) Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta (5) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan (6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, (7) Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat, (8) Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun, (8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

#### 2.4 Gambaran umum masyarakat perdesaan

Masyarakat miskin perdesaan pada umumnya dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut: (1) Terbatasnya lapangan kerja berkualitas, (2) Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial, (3) Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan, (4) Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan, (5) Rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana perdesaan, (6) Rendahnya kualitas SDM di perdesaan, (7) Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi bagi peruntukkan lain, (8) Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, (9) Lemahnya kelembagaan dan organisasi yang berbasis masyarakat, (10) Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan (Pedoman PPIP, 2008).

#### 2.5 Prinsip pelibatan masyarakat

Kegiatan program-program pemerintah dalam pelibatan masyarakat adalah dilaksanakan

secara swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/kelurahan.

Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab atas, pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan PNPM Mandiri di desa/kelurahan. Mekanisme dan prosedur pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Lingkup penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong yang terdiri atas 25 desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2009.

Lokasi pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan full populasi, yaitu 25 desa sasaran PPIP 2009 (tabel 1).

#### 3.2 Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah non

parametric, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan (Sugiyono, 2002). Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris (Suriasumantri, 1978). Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Metode analisis kualitatif digunakan bila data primer dan sekunder yang diperoleh berupa kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2002). Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden dalam bentuk wawancara, kuesioner, dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) diolah dengan metode analisis kualitatif.

Analisis data dalam pendekatan kualitatif terdiri atas tiga proses kegiatan, yaitu : reduksi data, tampilan (*display*) data, dan penulisan kesimpulan. Analisis kualitatif dalam penelitian tentang tinjauan dampak pelibatan masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dengan cara berikut ini.

- 1) Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara, jawaban kuesioner, dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis lalu membuat catatan atas data tersebut. Selain catatan, data juga bisa dibuat menjadi ringkasan data (*summary*), dan menyajikan/tampilan data dengan bentuk teks naratif, tabel, dan grafik .
- 2) Kemudian data-data hasil survey dianalisis dan didiskusikan. Hasil dari analisis dan diskusi adalah memberikan gambaran dalam bentuk teks naratif tentang dampak pelibatan masyarakat terhadap mutu konstruksi infrastruktur.

Tabel 1 Desa Sasaran PPIP 2009

<b>Kab. Donggala</b>	<b>Kab. Parigi Maoutong</b>
Desa Surumana	Desa Dusunan
Desa Watatu	Desa Laemanta
Desa Lalombi	Desa Sienjo
Desa Tolongano	Desa Pinotu
Desa Salungkaenu	Desa Siniu
Desa Bambarimi	Desa Lebo
Desa Lumbu Tarombo	Desa Avolua
Desa Lumbu Mamara	Desa Pelawa
Desa Tanah Mea	Desa Baliara
Desa Rerang	Desa Balinggi
Desa Gimpubia	
Desa Palintuma	
Desa Bambakanini	
Desa Dangara'a	
Desa Tamodo	

Tabel 2 Distribusi Jenis Infrastruktur

Jenis Infrastruktur	Jumlah Desa Sasaran
Jalan	23
Jembatan	3
Sanitasi Lingkungan (MCK dan Saluran)	7
Sarana Air Bersih	2
Irigasi Perdesaan	-

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Gambaran Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat

- Jenis infrastruktur

Jenis infrastruktur PPIP 2009 di Propinsi Sulawesi Tengah yang menjadi skala prioritas di setiap desa sasaran adalah infrastruktur jalan perdesaan (tabel 2).

Proses menentukan skala prioritas melalui rembug desa yang membahas tentang hasil identifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan membahas tentang upaya-upaya pemecahan permasalahannya, serta kesepakatan dalam penanganannya. Rembug desa dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang diharapkan mampu merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dapat dituangkan dalam rumusan penanganan yang sesuai dengan kondisi desa saat ini.

Sarana yang dibangun lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, sarana yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek berakhir, serta penguatan kembali modal-modal sosial yang ada pada masyarakat, seperti dalam bentuk gotong-royong dan kerja bakti.

Infrastruktur jalan menjadi skala prioritas usulan yang dominan di tingkat desa (65,71%). Hal ini terkait dengan beberapa faktor, antara lain: (1) prasarana aksesibilitas yang ada belum terpenuhi, seperti akses menuju kantong-kantong produksi dan akses yang menghubungkan antara desa sekitarnya, (2) pelibatan tenaga kerja lebih besar (*labor-intensive*) dalam implementasi program, dan (3) proses pelaksanaannya lebih singkat di banding dengan infrastruktur jenis yang lain, serta (4) pemerataan manfaat kepada banyak warga, dan (5) memiliki basis dengan keterampilan masyarakat.

Konstruksi jalan yang umumnya digunakan adalah jalan dengan lapis pasir batu/kerikil (sirtu) di sejumlah 17 desa sasaran dan 5 (lima) desa menggunakan jalan tanah yang dipadatkan. Untuk sarana sanitasi lingkungan berupa saluran menggunakan konstruksi pasangan batu kali.

Dari sisi fungsi atau kegunaan, sarana yang dibangun, yaitu: (1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin (prasarana air bersih atau prasarana jalan), (2) membuka keterisolasian hubungan antar warga desa, dan (3) meningkatkan akses produktivitas usaha ekonomi (tani dan nelayan), serta (4) memudahkan hubungan sosial antar warga.

- Mutu pelaksanaan

Mutu infrastruktur hasil program PPIP 2009 menunjukkan bahwa pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (tabel 3). Standar mutu yang digunakan berdasarkan beberapa faktor, yaitu: (1) keamanan, (2) keselamatan, dan (3) kenyamanan, serta (4) kemudahan.

Kualitas pekerjaan infrastruktur PPIP 2009 di Propinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan pelaksana menunjukkan bahwa:

- 1) Pembangunan sarana infrastruktur yang dilaksanakan masyarakat pada umumnya memiliki *cost-effective* yang tinggi (diukur dari biaya yang dikeluarkan dan manfaat dan dampak proyek yang dihasilkan)
- 2) Kualitas sarana yang dibangun oleh masyarakat memiliki kualitas sedang cenderung baik, bahkan di beberapa kasus dengan kondisi, yaitu (1) konstruksi lebih

bagus, (2) volume lebih besar, dan (3) namun kasus tertentu, finishing kurang memuaskan dan tingkat kenyamanan yang kurang karena terkait dengan keterampilan tenaga kerja dan keterbatasan peralatan.

- Kemampuan sumber daya masyarakat

Kemampuan sumber daya masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa, yaitu: (1) tingkat keahlian masih sangat terbatas, (2) tingkat keterampilan cukup baik, dan (3) tingkat produktivitas kerja yang sedang. Keterbatasan ini, sangat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat perdesaan untuk beberapa desa masih sangat rendah, dan aksesibilitas yang tidak mendukung.

Tabel 4 Mutu Pelaksanaan

Jenis Infrastruktur	Mutu Pelaksanaan			
	Keamanan	Keselamatan	Kenyamanan	Kemudahan
Jalan	Baik	Baik	Cukup	Cukup
Jembatan	Baik	Baik	Baik	Baik
Sanitasi Lingkungan	Baik	Baik	Baik	Cukup
Sarana Air Bersih	Baik	Baik	Baik	Baik
Irigasi Perdesaan	-	-	-	-

Tabel 5 Kemampuan Sumber Daya Masyarakat Pada Jenis Pekerjaan

Jenis Infrastruktur	Kemampuan		
	Keahlian (knowledge)	Keterampilan (skill)	Produktivitas
Jalan	Sedang	Baik	Sedang
Jembatan	Sedang	Baik	Sedang
Sanitasi Lingkungan	Baik	Baik	Baik
Sarana Air Bersih	Baik	Baik	Baik
Irigasi Perdesaan	-	-	-

Tabel 6 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Jenis Infrastruktur	Sumber Daya		
	Tenaga Kerja	Material	Peralatan
Jalan	Cukup	Tinggi	Cukup
Jembatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sanitasi Lingkungan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sarana Air Bersih	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Irigasi Perdesaan	-	-	-

Kemampuan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan fisik infrastruktur perdesaan umumnya menunjukkan sangat baik, tetapi aspek keahlian masih sangat terbatas, serta tingkat produktivitas yang sedang cenderung membaik.

- Pemanfaatan sumber daya lokal

Pemanfaatan sumber daya lokal merupakan salah satu kriteria yang diterapkan dalam pelaksanaan PPIP 2009. Pemanfaatan sumber daya lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi perekonomian di daerah perdesaan dan membuka kesempatan kepada tenaga kerja setempat. Selain itu, sasaran ingin dicapai oleh Program PPIP, antara lain: meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan.

Penyerapan sumber daya lokal pada pembangunan infrastruktur perdesaan menunjukkan bahwa (tabel 6), antara lain:

- 1) Untuk infrastruktur jalan penyerapan material cukup tinggi. Hal ini, berkaitan dengan jenis konstruksi yang digunakan, yaitu konstruksi lapis batu pasir (sirtu) tetapi penyerapan tenaga kerja lokal (masyarakat setempat) untuk beberapa lokasi sangat rendah akibat beberapa faktor, seperti volume pekerjaan yang besar dan lokasi pekerjaan yang sulit/berat sehingga membutuhkan penggunaan alat berat

- 2) Untuk infrastruktur jembatan, sanitasi lingkungan, dan sarana air bersih menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi sebagai pekerja ataupun sebagai suplayer material dan peralatan. Tingkat partisipasi tersebut, sangat terkait dengan tingkat keahlian (*knowledge*), tingkat keterampilan, dan produktivitas, serta kondisi atau potensi desa yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti daerah-daerah yang masyarakatnya dominan di bekerja pada sektor perkebunan cenderung lebih rendah tingkat partisipasinya dibandingkan dengan di sektor pertanian.
- 3) keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan belum optimal, seperti belum terlaksananya rembuk-rembuk warga secara rutin, fungsi dan peran kader desa dan kelompok penerima pemanfaat belum berjalan.

- Pengelolaan proyek

Pengelolaan proyek PPIP 2009 melibatkan instansi terkait dan komponen pelaksana dari tingkat desa, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat. Sistem pengelolaan PPIP dengan dilaksanakan dengan beberapa prinsip, yaitu berdasarkan hasil musyawarah (*acceptable*), secara terbuka (*transparent*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), serta berkelanjutan (*sustainable*). Tingkat pengelolaan program PPIP di Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa:

- 1) Tujuan menciptakan *local good governance* (transparansi, akuntabilitas, dll) yang mendasari prinsip pengelolaan proyek belum cukup optimal tercapai. Namun sebagai sesuatu yang baru, upaya untuk program tersebut cukup positif dalam kerangka membangun proses belajar.
- 2) Praktek *local governance* justru telah berlangsung di tingkat masyarakat sekalipun dalam bentuk yang sederhana dan skala kecil, seperti: akses anggota masyarakat pada pembukuan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana proyek di tingkat desa, informasi tentang pekerjaan proyek.
- 3) Dalam bentuk yang lebih nyata, bentuk monitoring warga telah dilakukan melalui pertemuan rutin dalam melihat perkembangan kondisi fisik sarana (meski jumlah dan *frequency* kurang)

#### 4.2 Dampak Pelaksanaan PPIP

Pembangunan infrastruktur perdesaan yang telah dilaksanakan di 25 desa sasaran PPIP 2009 di Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa, proyek sarana dan prasarana yang dibangun pada dasarnya cukup sukses untuk membantu masyarakat karena memiliki dampak, antara lain: (1) Dampak ekonomi, seperti mengurangi waktu tempu, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk beli air, dan perluasan usaha baru, serta meningkatkan harga jual tanah, dan meningkatkan fungsi lahan (tidur), (2) Dampak lainnya, seperti meningkatkan keterampilan pengadministrasian, lingkungan yang lebih nyaman (tidak banjir, rumah lebih tertata), meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian, dan (3) menguatkan modal-modal sosial yang ada pada masyarakat, seperti dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara sarana sebagaimana disain proyek.

#### 5. Kesimpulan

Proyek infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang untuk meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, transparansi, dan akuntabel, serta berkelanjutan.

Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll)

#### 6. Daftar Pustaka

- Andi Asnudin, 2004, "Tinjauan Proses Pengadaan kontraktor skala kecil dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perdesaan", Institut Teknologi Bandung-Bandung
- Andi Asnudin, 2005, "Manajemen Proyek Konstruksi", UNTAD Press-Palu.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008, Pedoman Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Departemen Pekerjaan Umum, 2009 " Pedoman Sederhana Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan"
- Departemen Pekerjaan Umum, 2009 " Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan di Perdesaan"
- Departemen Pekerjaan Umum, 2009 " Petunjuk Teknis Sektor Irigasi Desa"

Departemen Pekerjaan Umum, 2009  
"Petunjuk Teknis Sektor  
Tambatan Perahu dan  
Jerambah/Titian"

Departemen Pekerjaan Umum, 2009,  
Kebijakan Teknis Pembangunan  
Infrastruktur Perdesaan dan  
Perkotaan berbasis  
Pemberdayaan Masyarakat

Johannessen Bjorn, 2000. "*Contracts  
Management*", *Labour Based  
Road Construction Works*",  
Advisory Support, Information  
Services and Training (ASIST –  
AP). International Labour  
Organization (ILO)

LP3ES, 2007 " temuan-temuan pokok  
studi evaluasi program  
pengembangan masyarakat di  
bidang infrastruktur perdesaan